

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gender adalah tolak ukur dalam menjelaskan perbedaan sosial antara perempuan dan laki-laki. Konsep ini bersifat fleksibel atau dinamis, dan cenderung dapat berubah seiring waktu karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, dinamika politik, kondisi ekonomi sosial budaya, serta perkembangan masyarakat (Anggraini, 2020). Sehingga dapat dibilang bahwa perspektif dan stereotipe akan gender ini tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan politik pada masa-masa tertentu, yang artinya terdapat kedinamisan pada gender.

Di masa kini, Indonesia telah menjalani masa perubahan politik yang signifikan, dimana terdapat momen pemilihan umum pada negara Indonesia pasca revolusi pada tahun 1998, dimana saat ini adalah masa keterlibatan rakyat untuk ikut aktif dalam bersuara dalam pemilihan pemimpin. Diantaranya baru-baru ini adalah adanya pemilihan presiden atau kepala negara dan calon legislatif, kemudian selanjutnya adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada, yang baru beberapa bulan dekat ini di tahun 2024 telah dilaksanakan bersama. Umumnya dalam pemilihan umum, baik gender pria maupun wanita, memiliki hak yang sama dalam konteks politik dan mencapai tampuk pemerintahan, hal ini tertuang pada pasal 28 E Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perempuan yang berhak untuk memilih dan dipilih, namun sepertinya dalam prakteknya masih ada beberapa bentuk diskriminasi dan ketidakterlibatan wanita dengan baik dalam politik.

Dapat dilihat pada hasil riset pemilihan legislatif Kota Dumai pada Periode terdahulu, di tahun 2019-2024, dimana menurut riset Jurnal tentang representasi perempuan pada politik di Kota Dumai di periode tersebut, terjabar perolehan suara yang didapatkan oleh calon wanita yang diusung dari 30 caleg sangat tidak baik, dimana 19 laki-laki, dan 11 perempuan yang terdaftar oleh partai PPP ke KPU di

kota Dumai, hanya 3 caleg yang berhasil lolos dan menduduki DPRD Kota Dumai, dan 3 diantaranya berkelamin laki-laki, hal ini mengindikasikan bahwa calon legislatif perempuan tidak berhasil dan mampu menduduki kursi DPRD Dumai dari partai PPP. Hasil perolehan suara tersebut jelas menunjukkan bahwa suara yang diraih oleh perempuan dari partai PPP dalam pemilu legislatif tahun 2019 tergolong rendah. Padahal perempuan sendiri sudah memiliki hak dalam hukum untuk terlibat dalam politik, serta representasi politik perempuan dalam politik saat ini berperan penting dalam mewakili aspirasi suara perempuan yang dapat membawa roda pemerintahan dalam perubahan (Darmansyah & Sartika, 2024).

Selanjutnya, hasil riset partisipasi politik perempuan pada pemilu, terdapat stagnasi dalam keterwakilan pada wacana pemilu provinsi tersebut, meski telah ada upaya meningkatkan keterlibatan perempuan, hasil tren menunjukkan partisipasi politik perempuan berada pada titik yang rendah. Pada periode legislatif 2019-2024 dan 2024-2029 hanya 18,2% perempuan terpilih pada kancah DPRD provinsi tersebut, sehingga jauh dari kuota 30% yang ditargetkan pemerintah. Persentase 18,82% ini jauh dari target kuota 30% yang diamanatkan oleh kebijakan kuota nasional untuk mendorong keterlibatan perempuan yang lebih besar. Meskipun tujuan penargetan oleh pemerintah adalah upaya yang baik, namun masih terdapat hambatan sistemik seperti patriarki, kurangnya dukungan partai, serta akses terbatas pada sumber daya politik, membuat keterlibatan perempuan belum signifikan. Lain dari itu, rendahnya pendidikan politik dan pemberdayaan substantif perempuan memperburuk situasi, dan membuat keterlibatan perempuan sering hanya sebagai simbolis tanpa mendorong perubahan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender lebih baik (Lestari, 2024).

Dari penelitian diatas, menunjukkan masalah perempuan dalam politik di Indonesia, pada penelitian pertama dalam pemilu DPRD hanya 3 dari 30 calon partai PPP yang terpilih. Dimana 11 diwakili perempuan, 19 laki-laki. Namun 3 terpilih tersebut hanya laki-laki. Penelitian kedua terdapat masalah perempuan dalam politik di Indonesia kembali, dimana perempuan masih belum dapat

mencapai angka keterlibatan pada aturan kuota yang ditetapkan sebanyak 30% oleh pemerintah. Pandangan patriarkal, kurangnya dukungan, serta minimnya pemberdayaan sumber daya membuat keterlibatan perempuan dalam politik seringkali bersifat simbolis tanpa mendorong perubahan kesetaraan gender yang signifikan.

Ketidaksetaraan kemampuan perempuan, terkhusus di Indonesia dalam ranah politik dan kekuasaan menjadi bentuk diskriminasi dalam budaya tradisional. Padahal sejak masa lalu terdapat berbagai tokoh perempuan yang mampu melampaui pandangan tradisional tersebut, seperti R.A Kartini, Tribhuwana Tungadwi, serta Ratu Dyah Suhita misalnya. R.A Kartini menjadi pelopor emansipasi wanita Indonesia yang menitikberatkan pada perjuangan pendidikan perempuan. Kartini berupaya mendirikan sekolah dan gagasan kesetaraan gender dan membuka jalan bagi perempuan Indonesia terbebas dari belenggu adat dan menjadi kunci kemajuan bangsa (Riwanti et al., 2022). Dalam sejarah terlihat sejak terjangkaun perempuan pada lingkungan masyarakat sosial pada zaman Indonesia kuno, dimana pada era kerajaan kuno di Jawa, sosok seperti Ratu Shima, Pramodawardhani, Ken Dedes, Gayatri, Tribhuwana, dan Dyah Suhita, mempunyai peran signifikan yang tidak hanya pada ruang domestik sehingga membuat perempuan tersebut mampu berperan dalam perkembangan sosial, politik, dan kemajuan kerajaan, yang kemudian melampaui pandangan atau stereotipe gender yang membatasi (Erlangga & Nelsusmena, 2022).

Selain itu, saat ini juga masih terjadi permasalahan gender di Kesultanan Yogyakarta, yang menjadi sorotan sejak sabda Raja 2015, dimana terdapat ketetapan penerus tahta dari keturunan Sultan HB X yaitu perempuan. Tradisi pewarisan tahta Kesultanan Yogyakarta ini menganut sistem monarki yang patrilineal biasanya menyerahkan tahta kepada saudara laki-laki, andai saja raja tidak mempunyai keturunan laki-laki. Namun, sabda Raja ini mendapatkan tantangan karena dianggap telah melanggar paugeran adat dan kurang memiliki legitimasi hukum. Sultan HB X kemudian menggugat UU No. 13 Tahun 2012

tentang keistimewaan DIY Ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkhusus pasal yang mensyaratkan calon Gubernur DIY harus menyertakan daftar riwayat hidup dengan mencantumkan “istri”, yang dianggap diskriminatif perempuan. Akhirnya MK menerima gugatan melalui putusan No.88/PUU-XIV/2016, yang memperbolehkan laki-laki atau perempuan memegang jabatan Gubernur DIY, hal ini lalu memperkuat posisi hukum Sabda Raja.

Pro dan kontra menyertai, kerabat sultan, termasuk adik-adiknya memandang Sabda Raja adalah pelanggaran adat dan hal ini ditunjukkan dengan protes simbolis dengan tidak hadirnya mereka dalam pengumuman gelar baru GKR Mangkubumi sebagai penerus tahta. Budayawan Emha Ainun Nadjib menilai bahwa istilah seperti “Panatagama” yang biasa digunakan pada pemimpin Kraton tidak cocok disandang perempuan karena terkait peran imam dalam Islam. Namun, sebaliknya tokoh seperti Prof. Dr. Faruk dari UGM berpendapat bahwa raja mempunyai wewenang mutlak dalam menentukan penerus. Kemudian terdapat dukungand ari salah satu warga Kraton, Bu lilies, yang berpendapat bahwa kepemimpinan tidak terbatas pada gender, asal mereka mampu, mengingat Indonesia pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Perdebatan ini mencerminkan tradisi dan modernitas serta menunjukkan bahwa modernisasi dalam merubah budaya tentang kesetaraan gender memang belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia, karena keterbatasan pada budaya yang ada (Jannatur Rahmah & Yusdani, 2020).

Masalah gender dalam kekuasaan dan politik tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di Korea Selatan. Diketahui meskipun maju secara ekonomi dan teknologi, Korea Selatan masih memiliki kesenjangan gender yang tinggi, bahkan menempati peringkat ke-102 dari 156 negara dalam laporan World Economic Forum 2021 (Bahirah, 2023). Keterwakilan perempuan di parlemen Korea Selatan juga terlihat rendah, dimana pada pemilihan Majelis Nasional ke-10 tahun 2016, perempuan hanya mendapatkan angka 17% dari total kursi parlemen Ipu parline dalam (Kumalasari & Rosyida, 2022). Kemudian dalam data UN Women pada pemilihan Majelis Nasional ke-21, perempuan memperoleh 19% dari

300 kursi yang tersedia UN Women 2020 dalam (Kumalasari & Rosyida, 2022). Dapat dilihat bahwa permasalahan gender dalam politik ini tidak hanya terbatas di Indonesia saja, namun juga ada pada Korea Selatan. Hal ini dikarenakan di Korea masih erat kaitannya dengan budaya patriarki dan konfusianisme di benak masyarakat Korea Selatan itu sendiri (Bahirah, 2023).

Oleh karena itu, masalah gender di Korea Selatan tidak hanya terjadi di masa modern seperti masalah gender di Indonesia, dimana di Indonesia masalah gender sudah terjadi sejak masa lalu, dimana sejak masa R.A Kartini, dan beberapa tokoh seperti Ratu Dyah Suhita, Tribuwana Tunggal, dan sebagainya ketidakadilan gender sudah terjadi. Di Korea pada masa lalu pun mengalami hal serupa, dimana terdapat tokoh sejarah Korea yang mengalami hal serupa, yaitu Ratu Woo. Dimana Ratu Woo harus menghadapi tantangan patriarki dalam lingkungan sosial dan politik masih di dominasi laki-laki. Ratu Woo dari Goguryeo sosok yang menunjukkan kepemimpinan unik melalui adaptasi situasional dan hubungan interpersonal strategis. Meskipun mendapat beberapa evaluasi negatif pada historiografi tradisional, tindakannya dapat dipandang sebagai upaya melampaui norma sosial serta takdir yang ada dimasa, kepemimpinannya mampu memperluas konsep kepemimpinan perempuan yang berfokus pada otonomi dan transformasi seperti kontrol dan kekuasaan yang berbeda dengan nilai-nilai maternal tradisional (Kyungmin, 2016).

Film adalah media yang efektif dalam membentuk persepsi dengan representasi yang tersajikan pada sebuah individu atau kelompok. Hal tersebut disebabkan karena karakteristik film ini dianggap mempunyai jangkauan, realisme, pengaruh emosional, serta popularitas luar biasa (Maharani, 2020). Film sendiri sebagai salah satu bentuk media massa yang berperan penting dalam sosial kultural, artistik, politik, dan dunia ilmiah. Dengan memanfaatkan film dalam dunia untuk upaya pembelajaran masyarakat ini dapat sebagian didasarkan pada pertimbangan bahwa film memiliki kemampuan dalam menarik perhatian orang lain dan sebagian berdasar alasan bahwa film memiliki kemampuan mengantar pesan dengan cara

unik (Mcquail, 1997). Semakin berkembangnya zaman, terdapat beberapa film Indonesia dan film drama korea yang dibuat, dengan mengangkat dan mengisahkan tentang isu, dan kesetaraan gender didalamnya.

Pada film indonesia yang menggambarkan isu gender dalam lingkungan sosial yang patriarki dimana perempuan dilarang menempuh pendidikan tinggi dan tidak berhak membuat keputusan sendiri ada pada film R.A. Kartini. Dalam jurnalnya berjudul "Representasi Maskulinitas Pada Karakter Perempuan Dalam Film "Kartini" Karya Hanung Bramantyo" (Dillawati et al., 2022) meneliti bagaimana sosok Kartini yang menghadapi tantangan patriarki yang ada pada kehidupan kaum perempuan, melalui kehidupannya yang ditunjukkan pula peran perempuan yang penting dan tidak hanya pemain pendukung, scene yang diangkat menggambarkan Kartini dan adik perempuannya menunjukkan perlawanan atau mendobrak terhadap konsep peran gender dalam budaya patriarki, seperti laki-laki yang biasanya berperan sebagai kepala utama, dan memperlihatkan sosok kartini sebagai perempuan dengan sisi lain, melalui scene yang merepresentasikan maskulinitas perempuan seperti kekuasaan, keberanian, serta kepemimpinan.

Selanjutnya film bertema kekuasaan yaitu Tilik The Series yang telah diteliti (Hanifah & Sulistyani, 2024) melalui jurnalnya dengan judul "Representasi Perempuan Berpolitik Dalam Film Tilik The Series" meski berlatar masa modern, film ini menjelaskan bagaimana kekuasaan perempuan mengadopsi praktik maskulinitas politik dengan kepemimpinan menggunakan gaya maskulinitas dengan penggambaran yang dilakukan oleh perempuan sendiri, seperti kesejahteraan rakyat, kesetaraan, dan pemberdayaan, daripada laki-laki pada filmnya yang menggunakan politik kekuasaan uang, sehingga kekuatan perempuan tidak kalah dengan laki-laki dengan cara dan pengalaman perempuan dengan metode nya sendiri.

Sedangkan sebelumnya terdapat pula film korea yang menceritakan kekuatan Perempuan yaitu under the queen umbrella yang menggambarkan ratu kuat, yang sebelumnya pernah dianalisis oleh (Fadhila, 2025), film tersebut

merepresentasikan feminisme melalui symbol dan narasi visual yang melawan patriarki. Ratu Hwaryong sebagai tokoh utama yang tergambar dengan sosok kuat dan berdaya, yang mampu menggunakan kebersamaan dan empati melawan ketidakadilan gender.

Selain itu, terdapat film *The Great Queen Seondeok* yang mengisahkan Perempuan kuat dan berdaya, yang juga diangkat dalam jurnal oleh (Woo, 2011) Dimana film nya merepresentasikan kepemimpinan perempuan melalui konflik antara Ratu Seondeok dengan tokoh lain, yang tergambar perjuangan Ratu Seondeok tidak hanya sebagai penguasa di era patriarki, namun juga menyampaikan pesan relevan tentang gender.

Pada dasarnya, diskriminasi gender tersebut adalah karena konstruksi yang dibuat oleh pemahaman masyarakat tertentu dan bukanlah sebuah kodrat. Sehingga di tiap masa dan belahan bumi tertentu terdapat sebuah diskriminasi gender, yang kemudian juga tidak jarang terdapat bentuk penentangan akan stereotipe gender sendiri akan konstruksi yang ada pada pemahaman gender tradisional tersebut di tiap masa dan belahan bumi tertentu.



Gambar 1.1 Poster Queen Woo
(Sumber:Viu.com)

Oleh karena itu salah satu film yang menarik perhatian peneliti untuk dikupas, adalah film drama korea *Queen Woo*, dimana pada film korea yang rilis pada 2024 ini terepresentasi gender melalui tokoh perempuan Ratu Woo, yang memiliki kekuasaan di kerajaan Goguryeo. Dalam film drama ini, Ratu Woo tergambar sebagai sosok bergender perempuan yang memiliki kekuatan atau kekuasaan pada kerajaan dan rakyat didalamnya. Pada kisah Ratu Woo tersebutlah terepresentasi gender yang memiliki kekuasaan dan menantang stereotip tradisional tentang peran perempuan pada masa tersebut. Film *Queen Woo* ini juga menempati peringkat 4 dunia dengan penonton terbanyak selama 1 bulan di bulan September dalam platform Viu (*Viu's Global Top 10*, 2024). Selain itu, *Queen Woo* juga menarik minat penonton dengan mendapat rating 7,8/10 di MyDramaList dan 7.3 di Imdb, oleh karena itu, film ini sempat menjadi trending di media sosial X dengan tagar #QueenWoo karena adegan dan alur cerita yang epik (Salimah, 2024).



Gambar 1.2 Ulasan *Queen Woo*
(Sumber:mydramalist.Com)

Pada gambar diatas terdapat ulasan pengguna pada web MyDramaList yang juga telah di beri respon positif sebanyak 46 pengguna, dimana ulasannya adalah pandangannya sebagai penonton terkait film *Queen Woo* seperti wanita atau Ratu yang tidak menyerah pada takdir atau nasibnya sendiri dan melawan nasibnya demi bertahan, kemudian pandangannya adalah jika laki-laki mampu memerintah, maka perempuan juga dapat melakukannya.

Selain itu, film tersebut juga menarik dikupas karena melihat kondisi permasalahan gender politik Indonesia di masa lalu memiliki kesamaan dengan masalah gender yang tergambar di Korea, dimana tokoh-tokoh yang menantang stereotipe gender ini juga ada, hal ini juga termasuk pada film drama Korea *Queen Woo* tersebut, yang dimana perempuan bergender di masa lalu baik di belahan dunia Indonesia maupun Korea masih belum mendapat kesetaraan dalam banyak hal, salah satunya dalam kekuasaan. Ketidaksetaraan ini masih terjadi juga pada Indonesia dan Korea di masa kini, dimana gender perempuan masih kurang mendapat dukungan dalam kekuasaan maupun berpolitik, dan rata-rata masih kurang memperoleh kemenangan atau keterwakilan dalam pemilihan umum atau pula legislatif, sehingga masih ada cerminan gender tradisional atau patriarkal pada lingkungan politik dan masyarakatnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana representasi gender, kekuasaan, dan politik ditampilkan dalam film Korea *Queen Woo*, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk pembelajaran gender?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi gender, kekuasaan, dan politik dalam film Korea *Queen Woo* dengan pendekatan semiotika tanda dari Roland Barthes. Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

Mengidentifikasi tanda-tanda visual dan naratif yang merepresentasikan peran gender dan kekuasaan dalam film dengan mencoba menafsirkan makna denotatif dan konotatif dari simbol-simbol yang berkaitan dengan relasi politik dan gender dalam konteks cerita film *Queen Woo*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang analisis media, studi budaya, dan representasi gender. Penelitian ini memperkaya literatur tentang penggunaan metode semiotika Roland Barthes dalam mengkaji teks visual serta memperluas pemahaman tentang bagaimana media populer membentuk persepsi masyarakat terhadap peran gender dan kekuasaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Mahasiswa dan akademisi, sebagai bahan referensi dalam memahami representasi gender dan kekuasaan dalam media visual, khususnya film.
- b. Pendidik dan fasilitator gender, sebagai media pembelajaran alternatif untuk mengangkat isu kesetaraan gender dalam konteks budaya populer.
- c. Sineas dan pembuat film, sebagai masukan kritis agar lebih peka terhadap representasi gender dan nilai-nilai politik yang disampaikan melalui karya sinematik mereka.

1.5 Sistematika Bab

BAB I	: PENDAHULUAN
	: Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Serta Struktur Penelitian
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA
	: Bab ini menjelaskan: Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Konsep.
BAB III	: METODOLOGI PENELITIAN
	: Bab ini menjelaskan: Desain Penelitian (Paradigma Penelitian, Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengambilan Data, Waktu Penelitian, Teknik Analisis Data, dan Teknik Keabsahan Penelitian)
BAB IV	: TEMUAN DAN PEMBAHASAN
	: Bab ini berisikan tentang. Temuan penelitian, dan Pembahasan dari Penelitian Serta Analisis
BAB V	: PENUTUP
	Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran penelitian Selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA	